

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas. Subkontraktor disini sebagai pihak ketiga dalam pekerjaan konstruksi tentunya sangat dibutuhkan oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam menciptakan suatu bangunan yang berkualitas. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penggunaan subkontraktor disini harus sesuai dengan persetujuan pihak Pengguna Jasa sebagai pihak pertama yang mempercayakan pekerjaan kepada kontraktor. Terjadi hubungan kontrak antara Penyedia Jasa dengan kontraktor, dan kontraktor dengan subkontraktor yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan ketika terjadi kepailitan yang dialami Pengguna Jasa yang mengakibatkan kerugian bagi subkontraktor karena belum jelasnya hubungannya dengan Pengguna Jasa, sehingga belum termasuk dari kreditor dari Pengguna Jasa yang mengalami kepailitan. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum subkontraktor sebagai pihak ketiga dalam perjanjian konstruksi ketika debitor pengguna jasanya mengalami kepailitan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, serta untuk memecahkan masalah memerlukan tipe pendekatan masalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan kepailitan terhadap pengguna jasa konstruksi dapat mengakibatkan kerugian bagi subkontraktor maupun kontraktor karena terdapat asas *Chain Liability* yang mewajibkan kontraktor membayarkan kepada subkontraktor tanpa mensyaratkan apakah pihak pengguna jasa telah membayar pekerjaan tersebut kepada kontraktor utama. Perlindungan hukum yang muncul terhadap Subkontraktor yaitu gugatan wanprestasi dana juga dapat memailitkan kontraktor utama yang belum membayarkan pembayarannya.

**Kata kunci: Jasa Konstruksi, Perlindungan Hukum Subkontraktor, Kepailitan.**